

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Serie E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 201 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 Seri A.3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2014 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kab. Cirebon dengan Bupati Cirebon yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2014;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu dalam hal ini evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2013, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dengan dasar tersebut beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi dimaksud.

Evaluasi Kinerja Pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, Realisasi Keuangan Daerah, dan indikator kinerja pembangunan tahun 2012 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7).

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah.

Kabupaten Cirebon letak daratannya memanjang dari arah Barat Laut ke Tenggara yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, dan merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki letak strategis di jalur Pantai Utara Jawa Barat dengan panjang pantai kurang lebih 54 km. Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108⁰19'30"- 108⁰50'03" Bujur Timur (BT) dan 6⁰30'58"- 7⁰00'24" Lintang Selatan (LS). Jarak terjauh dari Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 54 km. Luas administrasi Kabupaten Cirebon sebesar 990,36 Km² yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Cirebon dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	%
1	Waled	28.46	2.91
2	Pasaleman	32.11	3.29
3	Ciledug	13.25	1.36
4	Pabuaran	8.95	0.92
5	Losari	39.07	4.00
6	Pabedilan	24.08	2.47
7	Babakan	21.93	2.25

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	%
8	Gebang	31.68	3.24
9	Karangsembung	15.14	1.55
10	Karangwareng	23.12	2.37
11	Lemahabang	21.49	2.20
12	Susukan Lebak	18.74	1.92
13	Sedong	31.02	3.18
14	Astanajapura	25.47	2.61
15	Pangenan	30.54	3.13
16	Mundu	25.58	2.62
17	Beber	23.25	2.38
18	Greged	29.92	3.06
19	Talun	21.21	2.17
20	Sumber	25.65	2.63
21	Dukupuntang	36.40	3.73
22	Palimanan	17.18	1.76
23	Plumbon	18.19	1.86
24	Depok	15.55	1.59
25	Weru	9.19	0.94
26	Plered	11.34	1.16
27	Tengah Tani	8.97	0.92
28	Kedawung	9.58	0.98
29	Gunungjati	20.55	2.10
30	Kapetakan	60.20	6.17
31	Suranenggala	22.98	2.32
32	Klangenan	20.57	2.11
33	Jamblang	17.76	1.82
34	Arjawinangun	24.11	2.47
35	Panguragan	20.31	2.08
36	Ciwaringin	17.79	1.82
37	Gempol	30.73	3.15
38	Susukan	50.1	5.13
39	Gegesik	60.38	6.18
40	Kaliwedi	27.82	2.85
	Kabupaten Cirebon	990.36	100.00

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2010

Luas wilayah perairan Kabupaten Cirebon mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil. Berdasarkan hal tersebut, luas perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 399.6 km² (54km x 4mil x 1.85km).

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (geostrategic). Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
- b) Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer sebagai penghubung antara Kota Jakarta dengan kota-kota besar di daerah timur yaitu Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Surabaya, serta kota-kota di sekitar Cirebon. Jalan-jalan tersebut diantaranya ruas jalan Cirebon-Semarang, ruas jalan Cirebon-Bandung, ruas jalan Palimanan-Jatibarang; dan ruas jalan Cirebon-Indramayu. Selain itu, Kabupaten ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan antara Majalengka dan Kuningan yaitu ruas jalan Cirebon-Kuningan dan ruas jalan Sumber-Majalengka.
- c) Wilayah Kabupaten Cirebon juga dilalui oleh beberapa Ruas Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) yakni Ruas Jalan Tol Cikapali (Cikampek-Palimanan), Ruas Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci), Ruas Jalan Tol Kanci-Pejagan, serta adanya rencana pembangunan Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan.
- d) Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh beberapa Jalur Kereta Api utama di Pulau Jawa yakni Jalur Rel Kereta Api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon - Bandung, Jalur kereta api Cirebon - Semarang, dan Jalur kereta api Cirebon - Yogyakarta.
- e) Keberadaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa -Bali.

B. Topografi

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian yang bervariasi antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki letak ketinggian antara 0 - 10 m, antara lain Kecamatan Gunungjati, Suranenggala, Kapetakan, Mundu, Pangenan, Losari, Astanajapura dan Pabedilan. Adapun wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki letak ketinggian antara 11 - 130 m dari permukaan laut. Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Cirebon bervariasi antara 0 - 8 % sampai dengan lebih dari 40 %. Berdasarkan ketinggiannya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Daerah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas wilayah 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 2) Daerah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas wilayah 1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 3) Daerah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas wilayah 10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

- 4) Daerah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas wilayah 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 5) Daerah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas wilayah 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.
- 6) Daerah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas wilayah 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.2
Kemiringan Lereng di Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
Jumlah		99.036	100

Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2010

C. Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Cirebon memiliki struktur sebagai berikut : Aluvial (Qa)52.224 ha (52,76%), Hasil Gunung Api Muda yang tak Terurai (Qyu) 33.740 Ha (34,10%), Breksi Kompleks Kromong (Qvk) 1.110 Ha (1,12 %), Batu Gamping Kompleks Kromong (MI) 202,60 Ha, Formasi Kaliwungu (Pk) 8.964,20 Ha (9,06%), Formasi Cijulang (Tpel)825 Ha (0,83%), Formasi Kalibiuk (Tpb) 1.345 Ha (1,36%), dan Hasil Gunung Api Tua yang Tak Terurai (Qvu) 560 Ha (0,63%).

Kondisi struktur geologi di wilayah Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai. Struktur geologi di wilayah ini didominasi oleh struktur geologi jenis aluvial (52,76 %) dan Hasil Gunung Api Muda yang Tak Terurai (34,07 %).

Jika ditinjau dari kondisi jenis tanah di wilayah Kabupaten Cirebon didominasi oleh jenis tanah aluvial, baik aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, maupun asosiasi aluvial kelabu tua dan asosiasi regosol kelabu, regosol coklat keterabuan. Jenis-jenis tanah tersebut umumnya sesuai untuk pertanian semusim khususnya sawah, palawija dan perikanan. Selain itu jenis tanah lainnya yaitu litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, glei humus.

D. Hidrologi

Kondisi air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) daerah/wilayah, yaitu: daerah air tanah asin, daerah air tanah dangkal, daerah air tanah sedang, dan daerah air tanah langka.

Tinjauan terhadap kondisi hidrologi akan meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi : sungai, danau/situ dan mata air. Adapun air tanah meliputi : air tanah dalam dan air tanah dangkal.

a) Air Permukaan

1) Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki 1 (satu) buah Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung dengan 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Selain itu juga Kabupaten Cirebon memiliki 14 (empat belas) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dengan luas sebesar 1.312 Km².

DAS Cisanggarung memiliki beberapa Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam beberapa kewenangan baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pembagian wewenang DI tersebut sebagai berikut:

- a. DI dengan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi: Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanisi.
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
 1. DI Rentang seluas ± 20.632 Ha;
 2. DI Ciwaringin seluas ± 1.103 Ha;
 3. DI Seuseupan seluas ± 3.865 Ha dan
 4. DI Cikeusik seluas ± 6.903 Ha.
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 1. DI Walahar seluas ± 1.292 Ha;
 2. DI Jamblang seluas ± 2.164 Ha;
 3. DI Cipager seluas ± 1.056 Ha;
 4. DI Setupatok seluas ± 1.408 Ha;
 5. DI Paniis Lebak seluas ± 332 Ha;
 6. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
 7. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
 8. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
 9. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
 10. DI Katiga seluas ± 662 Ha; dan
 11. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha.
- d. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Cirebon meliputi:
 1. DI Jatisawit seluas ± 690 Ha;
 2. DI Soka seluas ± 282 Ha;
 3. DI Rajadana seluas ± 170 Ha;
 4. DI Ciparigi seluas 467 Ha;

5. DI Keputon seluas ± 446 Ha;
6. DI W. Sedong seluas ± 168 Ha;
7. DI Ciwado seluas ± 833 Ha;
8. DI Agung seluas ± 711 Ha;
9. DI Kecepat seluas ± 477 Ha;
10. DI Panongan seluas ± 952 Ha dan
11. DI Cangkuang seluas ± 806 Ha.

2) Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki 2 buah danau/situ yaitu : Setu Patok di Desa Pen Pen Kecamatan Mundu dengan kapasitas tampung 13.790.000 m³ luas 175 Ha dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong dengan kapasitas 1.850.000 m³. luas 19,67 Ha.

3) Mata Air

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 44 (empat puluh empat) titik yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	4	1. Mata air Citangkurak di Desa Cipanas 2. Mata air Cidahu di Desa Cipanas 3. Mata air Cibuyut di Desa Cipanas 4. Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
2	Palimanan	1	1. Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1. Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng 2. Mata air Balonggede di Desa Cipinang 3. Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1. Mata air Bakam di Desa Greged 2. Mata air Umbar di Desa Nanggela 3. Mata air Cilenceng di Desa Nanggela 4. Mata air Mandiingin di Desa Durajaya 5. Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak 6. Mata air Pakuwon di Desa Gumulung 7. Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1. Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa 2. Mata air Cidahu di Desa Belawa 3. Mata air Ciloa di Desa Belawa 4. Mata air Kegambulan di Desa Belawa; 5. Mata air Cikondang di Desa Wangkelang; 6. Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang; 7. Mata air Pesantren di Desa Pasawahan; 8. Mata air Cibirung di Desa Pasawahan; 9. Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan; 10. Mata air Sindang Pancuran di Desa Sindanglaut; 11. Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut; 12. Mata air Cibambansari di Desa Cipeujeuh; 13. Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon; 14. Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon;
6	Sedong	1	1. Mata air Ciwado di Desa Panongan

No	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
7	Astanajapura	1	1. Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1. Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem; 2. Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem 3. Mata air Gunung Cibulut di Desa Ciuyah 4. Mata air Balong di Desa Ciuyah 5. Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman	2	1. Mata air Tambu Racak di Desa Cigobang 2. Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1. Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1. Mata air Krandon di Desa Krandon 2. Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	3	1. Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat 2. Mata air Seureuh Beureun di Desa Sidawangi 3. Mata air Sipedang di Desa Sidawangi

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031

4) Daerah Irigasi

Daerah irigasi di wilayah Kabupaten Cirebon dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : daerah irigasi lintas kabupaten/kota (4.608 Ha) dan daerah irigasi utuh kabupaten/kota (5.021 Ha).

B) Air Tanah

Kondisi air tanah di Kabupaten Cirebon, diklasifikasikan ke dalam 4 daerah/wilayah yaitu: daerah air tanah asin, daerah air tanah dangkal, daerah air tanah sedang, dan daerah air tanah langka.

E. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini beriklim tropis, dengan suhu minimum 24^oc dan suhu rata-rata 28^oc.

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan antara 0-3.317 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan Kecamatan Palimanan (3.204 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

F. Penggunaan lahan

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Cirebon didominasi oleh jenis tanah aluvial, baik aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, maupun asosiasi aluvial kelabu tua dan asosiasi regosol kelabu, regosol coklat keterabuan. Jenis-jenis tanah tersebut umumnya sesuai untuk pertanian semusim khususnya sawah, palawija dan perikanan.

a) Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 penggunaan lahan untuk kawasan lindung sampai tahun 2031 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Cirebon

No	Komponen Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan resapan air	84
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan Pantai	540
	b. Sempadan Sungai	1.200
	c. Sempadan Danau	400
	d. Sempadan Mata Air	240
	e. Kearifan Lokal	412
	f. Kawasan RTH Perkotaan	2000
3	Suaka alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	16
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	a Rawan tanah longsor	4.635
	b Kawasan Rawan Gelombang pasang	24.209
	c Kawasan Rawan Rawan Banjir	4.412
	d Kawasan Rawan Angin Ribut	2.001
5	Kawasan Lindung Geologi :	
	a. Kawasan Kars	2
	Kawasan Panas Bumi	5
	b. Kawasan Rawan bencana alam geologi	
	a. Rawan letusan gunung api	10.638
	b. Rawan gerakan tanah	9.264
	c. Rawan abrasi	540
6	Kawasan Lindung lainnya :	
	Taman Margasatwa	20

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031

b) Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 penggunaan lahan untuk kawasan budidaya sampai tahun 2031 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Cirebon

No	Komponen Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	6.008
	a. Hutan produksi Tetap (HP)	4.383
	b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.625
2	Hutan Rakyat	14.000
3	Pertanian Tanaman Pangan	40.000
4	Pertanian Hortikultura	6.000
5	Perkebunan	8.000
6	Perikanan	4.758
7	Peternakan	25
8	Petambangan	610
9	Industri	2.000
10	Pariwisata	11.200

No	Komponen Pola Ruang	Luas (Ha)
11	Permukiman	18.731
12	Budidaya lainnya :	
	a. Perdagangan dan jasa	1.000
	b. Kawasan Pesisir dan laut	5.400
	c. Kawasan Pertahanan dan Kemanan	-
	d. Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1.865

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki potensi pengembangan wilayah yang sangat besar, potensi ini telah dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon pada RTRW Kabupaten Cirebon 2011-2031 yang ditetapkan oleh Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Seri E.7), Kabupaten Cirebon akan dikembangkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu.
- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia.
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam.
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan.
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Setelah Kebijakan penataan ruangnya ditetapkan, maka ditetapkan pula rencana struktur ruang wilayah yang terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dengan fungsinya masing-masing, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;
- b. PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;

- c. PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi;
- d. PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industri dan fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; dan
- e. PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dan fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapakecamatan, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari menjadi PKL (Pusat Kegiatan Lokal), peranan dan lingkup PKL tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peranan PKL Ciledug melayani beberapa kecamatan meliputi :
 - 1. Kecamatan Losari (PKLp);
 - 2. Kecamatan Pabedilan;
 - 3. Kecamatan Pabuaran;
 - 4. Kecamatan Waled;
 - 5. Kecamatan Babakan;
 - 6. Kecamatan Gebang; dan
 - 7. Kecamatan Pasaleman.
- b. Peranan PKL Lemahabang melayani beberapa kecamatan meliputi :
 - 1. Kecamatan Astanajapura (PKLp);
 - 2. Kecamatan Mundu;
 - 3. Kecamatan Pangenan;
 - 4. Kecamatan Sedong;
 - 5. Kecamatan Susukanlebak;
 - 6. Kecamatan Karangsembung; dan
 - 7. Kecamatan Karangwareng.
- c. Peranan PKL Sumber melayani beberapa kecamatan meliputi :
 - 1. Kecamatan Weru (PKLp);
 - 2. Kecamatan Beber;
 - 3. Kecamatan Greged;
 - 4. Kecamatan Plered;
 - 5. Kecamatan Tengahtani;
 - 6. Kecamatan Talun;

7. Kecamatan Kedawung; dan
 8. Kecamatan Gunungjati.
- d. Peranan PKL Palimanan melayani beberapa kecamatan meliputi :
1. Kecamatan Plumbon (PKLp);
 2. Kecamatan Klangeran;
 3. Kecamatan Jamblang;
 4. Kecamatan Depok;
 5. Kecamatan Dukupuntang; dan
 6. Kecamatan Gempol.
- e. Peranan PKL Arjawinangun melayani beberapa kecamatan meliputi :
1. Kecamatan Kapetakan (PKLp);
 2. Kecamatan Susukan;
 3. Kecamatan Kaliwedi;
 4. Kecamatan Gegesik;
 5. Kecamatan Panguragan;
 6. Kecamatan Suranenggala; dan
 7. Kecamatan Ciwaringin.

2.1.1.3 Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon memiliki Kawasan rawan banjir yang terdapat di beberapa kecamatan yang terletak di pesisir seperti Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Pangenan, Gebang, dan Losari. Kawasan rawan kekeringan umumnya melanda sebagian besar kecamatan di wilayah Timur. Untuk Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Cirebon Tahun 2007 dikelompokkan menjadi Longsoran Lebih Sering (1,37 %), Longsoran Sering (8,13 %), Relatif Mantap (85,59 %) dan Runtuhan dan Aliran (4,77 %). Adapun rincian daerah rawan bencana di Kabupaten Cirebon menurut RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- (1) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 4.635 (empat ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar meliputi :
 - a. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
 - b. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
 - c. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang;
 - e. Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;
 - f. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;
 - g. Desa Cupang Kecamatan Gempol; dan
 - h. Desa Karangwuni Kecamatan Sedong.
- (2) Kawasanrawan gelombang pasang seluas kurang lebih 24.209 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan) hektarmeliputi:
 - a. Kecamatan Kapetakan;

- b. Kecamatan Suranenggala;
 - c. Kecamatan Gunungjati;
 - d. Kecamatan Mundu;
 - e. Kecamatan Astanajapura;
 - f. Kecamatan Pangenan;
 - g. Kecamatan Gebang; dan
 - h. Kecamatan Losari.
- (3) Kawasanrawan banjir seluas kurang lebih 4.412 (empat ribu empat ratus dua belas) hektarmeliputi :
- a. Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
 - b. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
 - c. Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati;
 - d. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
 - e. Desa Tawang Sari Kecamatan Losari;
 - f. Desa Ambulu Kecamatan Losari;
 - g. Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;
 - h. Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
 - i. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
 - j. Desa Babakan Kecamatan Pabedilan;
 - k. Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
 - l. Desa Ciuyah Kecamatan Waled;
 - m. Desa Ambit Kecamatan Waled;
 - n. Desa Gunungsari Kecamatan Waled;
 - o. Desa Mekarsari Kecamatan Waled;
 - p. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu;
 - q. Desa Bayalangu Kecamatan Gegesik;
 - r. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
 - s. Desa Kedongdong Kecamatan Dukupuntang; dan
 - t. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.
- (4) Kawasanrawan angin ribut seluas kurang lebih 2.001 (dua ribu satu) hektar meliputi :
- a. Desa Panggangsari Kecamatan Losari;
 - b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang;
 - c. Desa Jatianom Kecamatan Susukan; dan
 - d. Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan.

2.1.1.4 Demografi

Berdasarkan jenis kelaminnya, Kabupaten Cirebon memiliki penduduk laki-laki sebanyak 1.161.808 jiwa (51,32 %) dan penduduk perempuan sebanyak 1.102.170 jiwa (48,68 %),sex rasio sebesar 105,30 %. Ini berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105

penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No	Kecamatan		Jenis Kelamin					
	Kode	Nama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
			N	%	N	%	N	%
1	010	WALED	29,388	50.94	28,309	49.06	57,697	100,00
2	011	PASALEMAN	14,137	50.47	13,874	49.53	28,011	100,00
3	020	CILEDUG	23,054	50.75	22,370	49.25	45,424	100,00
4	021	PABUARAN	18,906	50.91	18,230	49.09	37,136	100,00
5	030	LOSARI	31,704	49.80	31,959	50.20	63,663	100,00
6	031	PABEDILAN	31,203	50.81	30,213	49.19	61,416	100,00
7	040	BABAKAN	37,631	50.39	37,049	49.61	74,680	100,00
8	041	GEBANG	32,036	49.88	32,190	50.12	64,226	100,00
9	050	KARANGSEMBUNG	19,122	50.76	18,548	49.24	37,670	100,00
10	051	KARANGWARENG	15,670	51.14	14,969	48.86	30,639	100,00
11	060	LEMAHABANG	27,989	51.04	26,850	48.96	54,839	100,00
12	061	SUSUKAN LEBAK	20,488	50.61	19,992	49.39	40,480	100,00
13	070	SEDONG	22,459	51.77	20,927	48.23	43,386	100,00
14	080	ASTANAJAPURA	40,218	49.49	41,044	50.51	81,262	100,00
15	081	PANGENAN	22,574	50.48	22,141	49.52	44,715	100,00
16	090	MUNDU	37,943	51.69	35,456	48.31	73,399	100,00
17	100	BEBER	21,411	50.89	20,663	49.11	42,074	100,00
18	101	GREGED	29,517	51.26	28,061	48.74	57,578	100,00
19	111	TALUN	34,361	51.74	32,044	48.26	66,405	100,00
20	120	SUMBER	43,421	50.34	42,830	49.66	86,251	100,00
21	121	DUKUPUNTANG	31,740	50.67	30,905	49.33	62,645	100,00
22	130	PALIMANAN	31,559	49.28	32,486	50.72	64,045	100,00
23	140	PLUMBON	39,124	50.12	38,932	49.88	78,056	100,00

No	Kecamatan		Jenis Kelamin					
	Kode	Nama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
			N	%	N	%	N	%
24	141	DEPOK	33,358	51.00	32,054	49.00	65,412	100,00
25	150	WERU	35,071	52.34	31,937	47.66	67,008	100,00
26	151	PLERED	27,956	49.78	28,201	50.22	56,157	100,00
27	161	TENGAH TANI	22,131	51.54	20,808	48.46	42,939	100,00
28	162	KEDAWUNG	33,171	49.71	33,564	50.29	66,735	100,00
29	171	GUNUNGJATI	42,846	50.36	42,231	49.64	85,077	100,00
30	180	KAPETAKAN	29,783	50.13	29,633	49.87	59,416	100,00
31	181	SURANENGGALA	23,343	49.96	23,383	50.04	46,726	100,00
32	190	KLANGENAN	25,875	49.80	26,084	50.20	51,959	100,00
33	191	JAMBLANG	20,975	51.57	19,696	48.43	40,671	100,00
34	200	ARJAWINANGUN	34,434	49.07	35,736	50.93	70,170	100,00
35	201	PANGURAGAN	25,686	50.16	25,519	49.84	51,205	100,00
36	210	CIWARINGIN	19,886	49.08	20,629	50.92	40,515	100,00
37	211	GEMPOL	23,697	49.86	23,827	50.14	47,524	100,00
38	220	SUSUKAN	37,924	50.59	37,042	49.41	74,966	100,00
39	230	GEGESIK	40,515	49.94	40,617	50.06	81,132	100,00
40	231	KALIWEDI	21,828	50.00	21,830	50.00	43,658	100,00
KABUPATEN CIREBON			1,154,134	50.47	1,132,833	49.53	2,286,967	100,00

Sumber: Angka Sementara Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon 2013

Berdasarkan survey sosial ekonomi daerah tahun 2012, Kabupaten Cirebon berpenduduk 2.263.978 jiwa dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 2,286,967 jiwa (Proyeksi Bappeda). Pada kurun 2012-2012, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Cirebon sebesar 1,37%. Pada tahun 2012, kecamatan berpenduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 89.139 jiwa dan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 27.181 jiwa. Kecamatan yang pertumbuhan penduduk paling besar adalah Kecamatan Greged (1,97%) dan paling kecil adalah Kecamatan Arjawinangun (0,18%).

Tabel 2.7
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2012

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk		%
		Tahun 2012	Tahun 2013	Pertumbuhan
1	Waled	57.585	57.697	0,19%
2	Pasaleman	27.181	28.011	3,05%
3	Ciledug	46.038	45.424	-1,33%
4	Pabuaran	36.781	37.136	0,97%
5	Losari	58.926	63.663	8,04%
6	Pabedilan	56.144	61.416	9,39%
7	Babakan	67.720	74.680	10,28%
8	Gebang	62.830	64.226	2,22%
9	Karangsembung	37.690	37.670	-0,05%
10	Karangwareng	29.009	30.639	5,62%
11	Lemahabang	55.308	54.839	-0,85%
12	Susukan Lebak	40.381	40.480	0,25%
13	Sedong	43.115	43.386	0,63%
14	Astanajapura	83.048	81.262	-2,15%
15	Pangenan	47.272	44.715	-5,41%
16	Mundu	81.503	73.399	-9,94%
17	Beber	39.768	42.074	5,80%
18	Greged	55.973	57.578	2,87%
19	Talun	69.690	66.405	-4,71%
20	Sumber	89.139	86.251	-3,24%
21	Dukupuntang	66.624	62.645	-5,97%
22	Palimanan	60.517	64.045	5,83%
23	Plumbon	80.375	78.056	-2,89%
24	Depok	62.214	65.412	5,14%
25	Weru	70.715	67.008	-5,24%
26	Plered	56.298	56.157	-0,25%
27	Tengah Tani	44.322	42.939	-3,12%
28	Kedawung	68.716	66.735	-2,88%
29	Gunung Jati	85.283	85.077	-0,24%
30	Kapetakan	56.301	59.416	5,53%
31	Suranenggala	45.145	46.726	3,50%
32	Klangenan	55.971	51.959	-7,17%
33	Jamblang	38.484	40.671	5,68%
34	Arjawinangun	68.749	70.170	2,07%
35	Panguragan	46.499	51.205	10,12%
36	Ciwaringin	41.653	40.515	-2,73%
37	Gempol	47.674	47.524	-0,31%
38	Susukan	67.968	74.966	10,30%
39	Gegesik	76.118	81.132	6,59%
40	Kaliwedi	39.251	43.658	11,23%
	JUMLAH	2.263.978	2.286.967	1,02%

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon 2012

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari indikator pertumbuhan PDRB (Berlaku & konstan), laju inflasi, PDRB per kapita, indeks williamson, penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang ditangani.

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan sebesar 9,45%, PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar harga konstan 2012 naik sebesar 4,81%, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHB Kabupaten Cirebon tidak memperlihatkan pergeseran struktur ekonomi yang signifikan, namun pergeseran PDRB ADHK Kabupaten Cirebon menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang terus meningkat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon Tahun 2012 adalah 5,00%. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan persentase pertumbuhan PDRB tahun berkenaan dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya.

Tabel 2.8

Indikator Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2011-2012

No	Indikator	2012	2013 ^{***})	% naik/ (turun)
1	PDRB Harga Berlaku	24.921.398,45	27.277.681,11	9,45
2	PDRB Harga Konstan	8.966.292,39	9.414.607,01	5,00
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,81	5,00	3,95
7	Inflasi	3,03	3,03	0,00

Sumber:

- BPS Kabupaten Cirebon

***) Angka Sangat Sementara

Angka inflasi Kabupaten Cirebon tahun 2013 sebesar 3,03%, angka inflasi ini mengindikasikan angka inflasi yang lebih rendah dari target RPJMD tahun 2009-2014 yang sebesar 7,5%. Angka inflasi ini juga menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga di Kabupaten Cirebon tahun 2013 relatif kecil dan penurunan nilai mata uang Rupiah di wilayah relatif dapat ditekan.

2.1.2.2 Kesejahteraan sosial

Fokus kesejahteraan sosial diukur dari indikator aspek pendidikan (AMH, RLS, APK, APM), indikator aspek kesehatan (AKB, balita gizi buruk), dan indikator ketenagakerjaan (tingkat kesempatan kerja/penduduk yang bekerja).

Dari Aspek Pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH) 2012-2013 naik dari 92,54% menjadi 93,52%. Angka melek huruf atau "Literacy Rate" menunjukkan jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 6,89% menjadi 7,01%. Rata

lama sekolah (RLS) menunjukkan berapa lama rata-rata penduduk Kabupaten Cirebon bersekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dari 125,06% menjadi 109,23%, SMP dari 105,66% menjadi 110,63% dan SMA dari 69,93% menjadi 74,6%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dari 99,98% menjadi 99,99%, SMP dari 85,33% menjadi 89,30% dan SMA dari 57,85 menjadi 59,30%.

Dalam aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) naik dari 65,59 menjadi 65,72. Angka Kematian Bayi (AKB) naik dari 4,99 menjadi 4,87. Persentase balita gizi buruk turun dari 0,13% menjadi 0,09%. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh dalam perhitungan IPM dari Indeks Kesehatan (IK), yang merupakan indikator untuk hidup yang sehat dan panjang umur dengan mengukur dari harapan hidup saat kelahiran.

Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Cirebon naik dari 90,20% menjadi 90,10%. Indikator ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja/memiliki pekerjaan persentasenya menurun. Dalam aspek ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans tiap tahun membuka peluang kerja bagi pencaker untuk bekerja baik dalam maupun luar negeri. Pendapatan Per kapita mengalami kenaikan dari 9.296.775 menjadi 9.640.692, Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 14,94% menjadi 14,04%. Hal ini sangat berpengaruh pada indeks daya beli menjadi naik dari 64,55 menjadi 65,15.

Tabel 2.9

Tabel Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Indikator Kesejahteraan Sosial	Tahun		% Naik/(Turun)
		2012	2013	
1	Angka Melek Huruf (AMH)	92,54	93,52	1.06
2	Rata Lama Sekolah (RLS)	6,89	7,01	1.74
3	APK SD	125.06	109.23	-12.66
4	APM SD	99,98	99,99	0.01
5	APK SMP	105,65	110.63	4.71
6	APM SMP	85,33	89.30	4.65
7	APK SMA	74,60	79.58	6.68
8	APM SMA	57.85	59.88	3.51
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	65.59	65.72	0.20
10	Angka Kematian Bayi (AKB)	4.99	4,87	2.40
11	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.199	0.09	54.77
12	Tingkat kesempatan kerja (%)	90,20	90,10	-0.11
13	Pendapatan per kapita (Rp)	9.296.775	9.640.692	3.70
14	Persentase penduduk miskin	14,94	14,04	6.02
15	Indeks daya beli	64,55	65,15	0.93

Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Fokus aspek pelayanan umum diukur dari Indikator Layanan Pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio Guru Murid), Indikator Layanan Kesehatan (Rasio rumah sakit/penduduk, rasio puskesmas/penduduk), Indikator Layanan perizinan (jumlah perizinan yang dikeluarkan) dan Indikator Layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).

Pada layanan pendidikan, Dinas Pendidikan berupaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Cerdas dan Kompetitif, teruserberbenah dan menata sarana prasarana pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Saat ini, rasio jumlah peserta didik dan tenaga pendidik rata-rata 20 peserta didik per tenaga pendidik. Nilai ini sebenarnya sudah mencukupi, namun masih mendapat kendala pada kualitas tenaga pendidik yang tidak merata di masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitas tenaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam mengajar.

Tabel 2.10
Rasio Peserta Didik dan Tenaga Pendidik Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Jenjang	Formal			Non Formal			Jumlah		
		Peserta Didik	Tenaga Pendidik	Rasio Peserta Didik/Tng Pendidik	Peserta Didik	Tenaga Pendidik	Rasio Peserta Didik/Tng Pendidik	Peserta Didik	Tenaga Pendidik	Rasio Peserta Didik/Tng Pendidik
1	SD Sederajat	241,323.00	9,923.00	24.32	225.00	61	3.69	241,548.00	9,984.00	24.19
2	SMP Sederajat	102,144.00	5,892.00	17.34	3,305.00	492.00	6.72	105,449.00	6,384.00	16.52
3	SMA Sederajat	28,560.00	1,308.00	21.83	1,280.00	466	2.75	29,840.00	1,774.00	16.82
4	SMK	42,274.00	2,688.00	15.73	0	0	0.00	42,274.00	2,688.00	15.73
	JUMLAH	414,301.00	19,811.00	20.91	4,810.00	1,019.00	4.72	419,111.00	20,830.00	20.12

Sumber: Profil Pendidikan Data

Dalam aspek kuantitas dan kualitas sarana prasarana, layanan pendidikan masih kurang. Rasio peserta didik dengan ruang kelas adalah sebesar 31 peserta didik per ruang kelas. Rasio peserta didik dan ruang kelas masih cukup memadai.

Tabel 2.11
Rasio Peserta Didik dan Ruang Kelas Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Jenjang	Formal			Non Formal			Jumlah		
		Peserta Didik	Ruang Kelas	Rasio Peserta Didik/R. Kelas	Peserta Didik	Ruang Kelas	Rasio Peserta Didik/R. Kelas	Peserta Didik	Ruang Kelas	Rasio Peserta Didik/R. Kelas
1	SD Sederajat	241,548.00	6,906.00	34.94	225.00	805	0.28	241,548.00	7,711.00	31.33
2	SMP Sederajat	102,144.00	2,704.00	37.78	3,305.00	2,101.00	1.57	105,449.00	4,805.00	21.95
3	SMA Sederajat	28,560.00	812	35.17	1,280.00	971	1.32	29,840.00	1,783.00	16.74
4	SMK	42,274.00	1007	41.98	0	0	0.00	42,274.00	1,007.00	41.98
	JUMLAH	414,301.00	9,448.00	43.85	4,810.00	3,877.00	1.24	419,111.00	13,325.00	31.45

Sumber: Profil Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk, pertumbuhannya tidak tetap. Untuk sekolah Dasar (SD) rasionya naik dari 49,83 menjadi 49,86, Sekolah Menengah Pertama (SMP) rasionya naik dari 26,12 menjadi 26,18, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) naik dari 17,93 menjadi 17,96.

Rasio Guru per murid, pertumbuhannya tidak tetap. Untuk sekolah Dasar (SD) rasionya naik dari 34,50 menjadi 39,67, Sekolah Menengah Pertama (SMP) rasionya naik dari 55,80 menjadi 53,43, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) naik dari 64,33 menjadi 70,18.

Rasio Rumah Sakit per 1000 satuan penduduk mengalami kenaikan dari 0,031 menjadi 0,052. Rasio puskesmas per 1000 satuan penduduk mengalami kenaikan 0,025 menjadi 0,027. Rasio Puskesmas Pembantu per satuan (1.000) penduduk mengalami kenaikan 0,029 menjadi 0,031. Rasio Dokter per satuan penduduk (1.000) mengalami kenaikan 0,125 menjadi 0,156. Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk (1.000) mengalami kenaikan 1,27 menjadi 1,54.

Tabel 2.12
Indikator Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2013

No	Indikator Kesejahteraan Sosial	Tahun		% Naik/(Turun)
		2012	2013	
1	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia sekolah (10.000)			
	SD	49,86	42.01	-0.16
	SMP	26,18	22.83	-0.13
	SMA	17,95	17.69	-0.01
2	Rasio Guru per Murid (1.000)			
	SD	39,67	41.2	0.04
	SMP	53,43	57.68	0.08
	SMA	70,18	56.41	-0.20
3	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (10.000)	0,052		0.021
4	Rasio puskesmas per satuan (1.000) penduduk	0,027	0,025	0.002
5	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan (1.000) penduduk	0,031	0,030	0.002
6	Rasio Dokter per satuan penduduk (1.000)	0,156	0,146	0.031
7	Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk (1.000)	1,54	1,55	0.27
8	Perda perijinan	39		0,00
9	Penerbitan perijinan	9.455		2,05
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perijinan)	79,99		0,13
11	Rasio penduduk ber KTP (%)	87,29		-

Sumber: Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPPT

Untuk layanan Kesehatan, Kabupaten Cirebon di layani oleh 2 RSUD yaitu RSUD Waled dan Arjawinangun. Selain itu, layanan kesehatan bisa diperoleh dari 56 puskesmas dan 66 puskesmas pembantu. Dengan pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon yang mencapai 1,3%, layanan kesehatan per penduduk masih dirasa kurang untuk RS, Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

Untuk layanan perijinan, Kabupaten Cirebon memiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dari Tahun 2007 dengan dasar pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon. Sistem pelayanannya adalah “Penyelenggaraan Satu Hari Jadi” atau “One Day Service” berdasarkan Keputusan Kepala BPPT Nomor 503/Kep.131-BPPT/2010 tentang penerapan proses pelayanan satu hari jadi (one day service). Penerbitan perijinan tahun 2012 dikeluarkan 9.455 perijinan. Adapun angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan di Kabupaten Cirebon adalah sebesar 79,99.

Untuk layanan Kependudukan dan Catatan Sipil, kini sedang dan telah dilaksanakan program e-KTP yang dimulai pada akhir tahun 2011. Sampai saat ini, Penduduk Kabupaten Cirebon yang memiliki e-KTP adalah berjumlah **1.648.743**.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Cirebon ditunjang oleh sektor-sektor yang kontribusi PDRB nya besar dan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Cirebon, yang terbesar adalah Sektor Pertanian yang dibagi menjadi Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan & hasil-hasilnya, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor ini merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lumbung beras Jawa Barat. Luas lahan yang tersedia di kabupaten Cirebon untuk budidaya padi yaitu 54.000 hektar, dengan rata-rata luas tanam setiap tahunnya 85.000 ha (IP rata-rata 200), kapasitas produksi sebesar 510.856 ton/tahun Gabah Kering Giling (GKB). Kecamatan potensial yaitu Gegedik, Susukan, Kapetakan, Kaliwedi, Dukupuntang, Arjawinangun, Klangeran, Sedong, Ciwaringin, Suranenggala, Palimanan.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sub sektor perikanan adalah SDM nelayan yang rendah, mahalnya sarana produksi, gelombang pasang (rob) dan banjir. Produk perikanan tangkap juga terkendala oleh jenis kapal penangkap ikan yang masih didominasi oleh kapal kecil dengan kekuatan 5 GT sehingga hanya mampu menangkap ikan di zone II. Pola menangkap masih menggunakan metoda penangkapan ikan 1 hari (one day fishing).

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya dalam peningkatan produksi perikanan diikuti oleh upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pantai dengan menetapkan Indikator luas hutan mangrove dan jumlah terumbu karang buatan sebagai indikator keberhasilan pemulihan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan.

Analisis Sektor Basis (Location Quotient/LQ)

Bila memperhatikan sektor unggulan atau sektor basis yang berkembang di Kabupaten Cirebon maka ekonomi Kabupaten Cirebon ditunjang oleh sektor-sektor unggulan berbasis pertanian, bangunan, jasa, perdagangan hotel & restoran, keuangan persewaan jasa perusahaan. Sektor-sektor inilah yang secara komparatif memiliki keunggulan di Jawa Barat dibanding sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.14

Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon dibanding Jawa Barat Tahun 2012

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata	Ket
1	Pertanian	2,36	2,22	2,29	2,51	2,51	2,38	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,16	0,17	0,18	0,18	0,17	NON-BASIS
3	Industri Pengolahan	0,33	0,33	0,32	0,36	0,36	0,34	NON-BASIS
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,03	0,95	0,95	0,85	0,85	0,93	NON-BASIS
5	Bangunan	2,16	2,14	2,09	1,69	1,69	1,95	BASIS
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,16	1,12	1,06	0,93	0,93	1,04	BASIS
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,39	1,32	1,24	0,90	0,90	1,15	BASIS
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,39	1,36	1,33	1,44	1,44	1,39	BASIS
9	Jasa-jasa	1,77	1,83	1,86	1,67	1,67	1,76	BASIS

Sumber : Hasil analisis, Bappeda.

2.1.4.2 Fasilitas wilayah/infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur wilayah meliputi sistem jaringan prasarana memiliki peran strategis dalam pemantapan struktur perwilayahan dan mendukung pengembangan sektor andalan. Pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Cirebon diarahkan pada 5 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengembangan sistem jaringan prasarana perhubungan diprioritaskan pada jaringan jalan Kabupaten di dalam dan antar PKL. Untuk jalan yang berstatus jalan nasional merupakan kewenangan pusat, sedangkan Jalan Provinsi merupakan kewenangan provinsi.

Dari kondisi infrastruktur jalan, jalan-jalan Kabupaten Cirebon berupa jalan aspal kondisi baik diantaranya masih ada yang berupa jalan tanah.

Tabel 2.15

Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2013

No	Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	Tahun	
		2012	2013
1	Total Panjang Jalan Kabupaten (Km)	646.60	646.65
2	Rasio jalan dalam kondisi baik (%)	76,1	77,0
3	Total Jalan Desa dan Poros Desa (km)	468.07	468.07
4	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik (%)	62,28	66,67
5	Rasio Jaringan Irigasi	51.11	13,39
6	Panjang Saluran Irigasi (m)	2,754,937	115.510
7	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	53.905	8.622,88

Sumber: Bina Marga, dan PSDAP Kab. Cirebon.

Pemerintah daerah juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan jaringan irigasi dan pengairan, sebab Kabupaten Cirebon selalu dihadapkan pada kekurangan air di musim kemarau dan banjir di musim hujan karena wilayah Kabupaten Cirebon berada di zona hilir dan zona sedimentasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas PSDAP adalah menangani prasarana sumber daya air seperti upayapemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan/konservasi prasarana sumber air, irigasi, pantai dan muara, pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan tampungan air baik berupa embung maupun long storage, dan pembangunan waduk (Waduk Jatigede & Waduk Cipanundaan) untuk mengatasi banjir dan kekurangan air.

2.1.4.3 Iklim Investasi

Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perijinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan dasar pembentukan peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

Iklim investasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan iklim investasi yang sangat kondusif. indikatornya, pada tahun 2012 BPPT telah menerbitkan sebanyak 9.455 jenis perijinan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,99, dan nilai investasi mencapai Rp. 1.020.717.768.218,00. Dominasi nilai investasi diperoleh dari dari sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu PT. Cirebon Elektrik Power (CEP), pembangunan hotel Aston, pembangunan Perumahan dan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan (supermarket yoga dan minimarket). Iklim investasi didukung pula oleh stabilitas keamanan yang cukup kondusif ditandai oleh angka kriminalitas yang rendah (428) dan jumlah demonstrasi yang relatif kecil (25 demo).

Tabel 2.16

Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon

No	Indikator Iklim Investasi	Tahun		% Naik/(Turun)
		2012	2013	
1	Angka kriminalitas	428.00	124	71.03
2	Jumlah demo (kali)	25.00	35	40.00
3	Perda perijinan	39.00	39	0.00
4	Penerbitan perijinan	9,455.00	8.941	0.00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perijinan)	79.99	79,99	0.00
6	Jumlah perijinan yg dikenakan retribusi	4	4	100
7	Retribusi perijinan (Rp)	3,900,000,000.00	4,340,813,961.00	11.30
8	Nilai Investasi (Rp)	1,020,717,768,218.00	745,548,296,300	-26.96
9	Realisasi Investasi per sektor (Rp)			

	Pertanian	3,555,000,000.00	4,448,000,000	25.12
	Pertambangan	16,721,000,000.00	67,914,700,000	306.16
	Industri pengolahan	815,002,835,000.00	152,049,750,000	-81.34
	Listrik, gas dan air bersih	700,000,000.00	24,130,000,000	3,347.14
	Bangunan/konstruksi	84,044,013,218.00	51,790,995,000	-38.38
	Perdagangan, hotel	68,155,000,000.00	119,492,550,000	75.32
	Pengangkutan & komunikasi	750,000,000.00	1,000,000,000	33.33
	Keuangan persewaan & jasa perusahaan	8,239,920,000.00	273,395,601,300	3,217.94
	Jasa-jasa	23,550,000,000.00	51,326,700,000	117.95

Sumber: BPPT Kab.Cirebon& Satpol PP, 2012

Pada tahun 2013, pendapatan asli daerah dari retribusi perijinan sebanyak Rp. 4,340,813,961,00. Jumlahnya meningkat pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.900.000.000,00. Jenis-jenis retribusi perizinan diperoleh dari izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang Gangguan (HO), izin trayek, izin usaha perikanan.

2.1.4.4 Kondisi sumber daya manusia

A. Rasio ketergantungan/dependensi ratio

Rasio ketergantungan berdasarkan ketenagakerjaan menunjukkan seberapa besar ketergantungan penduduk bukan angkatan kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2013, maka angka ketergantungan masih diatas angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk bukan angkatan kerja jumlahnya masih lebih besar daripada penduduk angkatan kerja sehingga angka ketergantungan lebih besar dari 100%. Kecamatan yang angka ketergantungannya paling tinggi adalah Kecamatan Beber sebesar 1,27 dan Kecamatan yang angka ketergantungannya paling rendah adalah Kecamatan Weru yaitu 0,28.

Tabel 2.18
Rasio Ketergantungan Ketenagakerjaan.

No	Kecamatan	ANGKATAN KERJA			BUKAN ANGKATAN KERJA				Jumlah	Rasio
		Kerja	Mencari Kerja	Jumlah	Sekolah	Urus RT	Lain-nya	Jumlah		
1	010 WALED	25,650	411	26,061	26,061	1,055	11,845	1,767	14,667	0.56
2	011 PASALEMAN	9,486	955	10,441	10,441	1,378	7,460	145	8,983	0.86
3	020 CILEDUG	18,530	1,830	20,360	20,360	2,120	7,980	2,114	12,214	0.60
4	021 PABUARAN	15,573	1,121	16,694	16,694	1,689	6,680	1,498	9,867	0.59
5	030 LOSARI	18,765	2,490	21,255	21,255	3,625	11,180	4,695	19,500	0.92
6	031 PABEDILAN	26,677	1,407	28,084	28,084	2,592	6,090	2,993	11,675	0.42
7	040 BABAKAN	21,488	4,776	26,264	26,264	3,149	14,123	4,353	21,625	0.82
8	041 GEBANG	26,387	2,850	29,237	29,237	1,635	11,743	1,465	14,843	0.51
9	050 KARANGSEMBUNG	13,730	820	14,550	14,550	1,140	9,860	1,300	12,300	0.85

10	051 KARANGWARENG	9,000	1,470	10,470	10,470	1,395	8,055	1,185	10,635	1.02
11	060 LEMAHABANG	17,668	5,236	22,904	22,904	3,126	12,412	552	16,090	0.70
12	061 SUSUKAN LEBAK	15,125	2,079	17,204	17,204	1,650	8,239	1,265	11,154	0.65
13	070 SEDONG	15,248	1,983	17,231	17,231	2,349	8,662	2,227	13,238	0.77
14	080 ASTANAJAPURA	28,702	1,154	29,856	29,856	5,128	17,109	4,149	26,386	0.88
15	081 PANGENAN	19,740	1,840	21,580	21,580	1,340	8,735	1,005	11,080	0.51
16	090 MUNDU	32,951	2,204	35,155	35,155	4,417	9,953	5,014	19,384	0.55
17	100 BEBER	11,160	576	11,736	11,736	3,048	8,280	3,588	14,916	1.27
18	101 GREGED	17,772	2,675	20,447	20,447	2,827	12,616	1,601	17,044	0.83
19	111 TALUN	30,681	1,593	32,274	32,274	3,336	10,921	953	15,210	0.47
20	120 SUMBER	42,042	3,276	45,318	45,318	3,640	9,828	2,730	16,198	0.36
21	121 DUKUPUNTANG	26,150	1,800	27,950	27,950	4,095	12,540	1,820	18,455	0.66
22	130 PALIMANAN	22,162	1,848	24,010	24,010	3,388	12,600	2,702	18,690	0.78
23	140 PLUMBON	33,908	1,384	35,292	35,292	5,190	10,726	6,574	22,490	0.64
24	141 DEPOK	23,935	1,425	25,360	25,360	4,770	10,875	3,175	18,820	0.74
25	150 WERU	37,423	2,037	39,460	39,460	3,593	4,855	2,467	10,915	0.28
26	151 PLERED	25,424	1,610	27,034	27,034	4,606	6,622	812	12,040	0.45
27	161 TENGAH TANI	18,562	734	19,296	19,296	2,192	6,532	3,102	11,826	0.61
28	162 KEDAWUNG	34,005	2,636	36,641	36,641	3,256	6,804	2,723	12,783	0.35
29	171 GUNUNGJATI	33,879	4,160	38,039	38,039	5,489	13,085	3,730	22,304	0.59
30	180 KAPETAKAN	24,694	3,090	27,784	27,784	3,194	6,541	396	10,131	0.36
31	181 SURANENGGALA	15,105	4,033	19,138	19,138	1,951	8,905	2,096	12,952	0.68
32	190 KLANGENAN	20,637	3,788	24,425	24,425	2,702	10,504	2,437	15,643	0.64
33	191 JAMBLANG	13,827	1,857	15,684	15,684	3,456	2,691	5,817	11,964	0.76
34	200 ARJAWINANGUN	19,159	5,757	24,916	24,916	3,648	13,770	5,410	22,828	0.92
35	201 PANGURAGAN	17,776	2,674	20,450	20,450	1,884	7,956	2,838	12,678	0.62
36	210 CIWARINGIN	19,891	2,358	22,249	22,249	1,338	4,968	945	7,251	0.33
37	211 GEMPOL	17,106	2,296	19,402	19,402	4,324	7,040	2,408	13,772	0.71
38	220 SUSUKAN	23,030	2,645	25,675	25,675	5,450	13,690	3,205	22,345	0.87
39	230 GEGESIK	29,271	6,024	35,295	35,295	3,000	12,078	3,927	19,005	0.54
40	231 KALIWEDI	13,332	4,442	17,774	17,774	2,434	6,534	1,290	10,258	0.58
	Jumlah	885,649	97,344	982,990	982,989	120,592	381,079	102,464	604,149	0.61

Sumber: Survey IPM Kab. Cirebon Tahun 2012, Bappeda Kab.Cirebon.

B. Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, penduduk Kabupaten Cirebon dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut. Penduduk tidak/belum sekolah (6,28%), masih bersekolah (18,95%), dan tidak bersekolah lagi (74,77%). Dengan demikian, penduduk Kabupaten Cirebon masih rendah.

Tabel 1.11
Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Jenis Kelamin (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	38.859	76,983	115.842	6.28	4,11	8,58	100
Masih Bersekolah	181.497	167.899	349.396	18,95	19,19	18,71	100
Tidak Bersekolah Lagi	725.495	652.599	1.378.094	74,77	76,70	72,71	100

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Jenis Kelamin (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	945.851	897.481	1.843.332	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : BPS 2012, Bappeda, 2012

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD tahun 2013 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013, dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2009-2014.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2013

A. Urusan Wajib

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2012 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib
SKPD Tahun 2013 (Urusan dan Non Urusan)

SKPD	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4
Dinas Pendidikan	117,733,446,970.00	83,698,074,222.00	71.09
Dinas Kesehatan	99,167,141,892.00	94,255,936,292.00	95.05
RSUD Arjawinangun	68,815,849,064.00	54,846,816,354.00	79.70
RSUD Waled	126,652,772,775.00	121,902,494,037.00	96.25
Dinas Bina Marga	95,724,709,050.00	92,507,248,099.00	96.64
Dinas PSDAP	108,404,459,700.00	100,279,012,452.00	92.54
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	87,713,627,433.00	86,532,935,731.00	98.65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,763,869,900.00	8,318,005,545.00	94.91
Dinas Perhubungan	5,135,498,450.00	4,946,817,440.00	96.33
Badan Lingkungan Hidup Daerah	4,481,279,495.00	4,114,308,348.00	91.81
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	6,120,590,084.00	5,735,831,261.00	93.71
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	7,717,727,419.00	7,424,592,999.00	96.20
Dinas Sosial	6,624,191,050.00	6,446,206,969.00	97.31
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,745,154,950.00	5,506,430,250.00	95.84
Dinas Koperasi dan UMKM	3,081,125,120.00	2,702,824,049.00	87.72
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2,706,882,100.00	2,553,128,449.00	94.32
Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga	12,376,746,640.00	12,102,853,118.00	97.78
Badan Kesbanglinmas	4,739,262,100.00	4,525,956,401.00	95.50

SKPD	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4
Satuan Polisi Pamong Praja	4,363,410,700.00	4,213,174,388.00	96.56
Sekretariat Daerah	58,469,010,366.00	56,135,062,276.00	96.01
Sekretariat DPRD	34,564,506,500.00	26,847,130,717.00	77.67
Inspektorat	5,911,182,910.00	5,632,939,274.00	95.29
Dinas Pendapatan Daerah	11,949,677,730.00	9,957,048,207.00	83.32
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10,207,718,271.00	9,110,304,061.00	89.25
Kecamatan Waled	315,982,150.00	310,641,573.00	98.31
Kecamatan Ciledug	281,242,000.00	276,327,777.00	98.25
Kecamatan Losari	327,539,320.00	304,469,445.00	92.96
Kecamatan Pabedilan	276,604,300.00	267,918,259.00	96.86
Kecamatan Babakan	362,812,000.00	359,968,863.00	99.22
Kecamatan Gebang	359,155,440.00	338,037,650.00	94.12
Kecamatan Karangsembung	329,421,900.00	326,701,493.00	99.17
Kecamatan Lemahabang	321,612,900.00	302,664,397.00	94.11
Kecamatan Susukan Lebak	257,682,600.00	253,237,150.00	98.27
Kecamatan Sedong	307,824,000.00	307,267,040.00	99.82
Kecamatan Astanajapura	312,320,200.00	305,081,482.00	97.68
Kecamatan Pangenan	262,619,760.00	257,488,132.00	98.05
Kecamatan Mundu	362,770,000.00	357,917,369.00	98.66
Kecamatan Beber	264,116,100.00	255,612,282.00	96.78
Kecamatan Talun	350,331,500.00	341,082,178.00	97.36
Kecamatan Sumber	1,965,796,570.00	1,915,236,603.00	97.43
Kecamatan Dukupuntang	296,428,750.00	291,192,447.00	98.23
Kecamatan Palimanan	305,212,500.00	263,849,813.00	86.45
Kecamatan Plumbon	419,006,550.00	410,531,050.00	97.98
Kecamatan Depok	286,299,700.00	264,399,093.00	92.35
Kecamatan Weru	242,346,400.00	231,429,489.00	95.50
Kecamatan Kedawung	248,214,000.00	241,206,829.00	97.18
Kecamatan Gunungjati	227,948,500.00	217,204,300.00	95.29
Kecamatan Kapetakan	367,379,330.00	353,664,570.00	96.27
Kecamatan Klangeran	241,979,150.00	239,439,320.00	98.95
Kecamatan Arjawinangun	261,347,220.00	253,987,085.00	97.18
Kecamatan Panguragan	477,674,215.00	462,549,354.00	96.83
Kecamatan Ciwaringin	308,508,900.00	300,351,159.00	97.36
Kecamatan Susukan	284,391,100.00	280,084,576.00	98.49
Kecamatan Gegesik	227,391,375.00	226,026,588.00	99.40
Kecamatan Kaliwedi	289,596,800.00	275,041,629.00	94.97
Kecamatan Karangwareng	270,467,900.00	266,938,500.00	98.70
Kecamatan Tengah Tani	215,333,000.00	211,743,008.00	98.33
Kecamatan Gempol	231,670,500.00	222,277,668.00	95.95
Kecamatan Pasaleman	268,418,900.00	257,037,745.00	95.76
Kecamatan Plered	323,499,550.00	322,797,495.00	99.78
Kecamatan Pabuaran	272,326,200.00	266,807,228.00	97.97
Kecamatan Greged	299,264,730.00	294,096,461.00	98.27
Kecamatan Jamblang	273,581,300.00	266,536,760.00	97.43
Kecamatan Suranenggala	260,976,290.00	251,826,105.00	96.49
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian,	8,774,355,250.00	8,520,589,660.00	97.10

SKPD	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4
Perikanan dan Kehutanan			
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5,699,527,510.00	5,495,683,714.00	96.42
Kantor Kearsipan dan Dokumen	956,620,700.00	907,350,810.00	94.85
Dinas Komunikasi dan Informatika	2,432,597,314.00	2,348,914,879.00	96.56
Kantor Perpustakaan Daerah	3,227,000,000.00	3,121,103,981.00	96.72
Jumlah Total	931,817,035,043.00	843,839,443,948.00	90.55

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun Anggaran 2013 telah merealisasikan program dan kegiatan dengan target anggaran sebesar **Rp. 931,817,035,043,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 843,839,443,948,-**

B. Urusan Pilihan

Rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan setiap satuan perangkat daerah pada Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Adapun rekapitulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan SKPD Tahun 2013

SKPD	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	4	5	
Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	31,859,403,625.00	30,086,313,595.00	94.43
Dinas Kelautan dan Perikanan	12,646,490,983.00	11,960,135,876.00	94.57
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5,678,983,550.00	5,483,945,119.00	96.57
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1,801,183,500.00	1,740,936,950.00	96.65
Dinas PSDAP	1,829,173,800.00	1,736,840,725.00	94.95
Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga	1,917,800,000.00	1,864,214,400.00	97.20
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	413,113,800.00	381,703,900.00	92.39
Jumlah Total	56,146,149,258.00	53,254,090,565.00	94.84

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2013 telah merealisasikan program kegiatan dengan target anggaran sebesar **Rp. 56,146,149,258,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 53,254,090,565,-**.

2.2.2 Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2009-2014

Evaluasi indikator makro mencakup realisasi dari target pencapaian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014.

A. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama.

Tujuan Misi:

Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak dan berilmu.

Tabel 2.24
PENCAPAIAN INDIKATOR MISI 1
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013

NO	Sasaran (5 tahun)	Indikator Sasaran	TAHUN 2013	
			Target	Realisasi
1	Tercapainya rata-rata penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 10%.	Rasio jumlah tempat peribadatan per satuan penduduk (1.000)	3.061	
		- Tempat ibadah	7,225	
		- Jumlah penduduk (jiwa)	2,360,034	2.286.967
		Jumlah Demo	9	35
		Angka kriminalitas (10.000)	3.30	0,54
		- Jumlah tindak kriminal yang ditangani	779	124

B.Misi kedua

Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin.

Tujuan : Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera.

Tabel 2.25
PENCAPAIAN INDIKATOR MISI 2
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013

No	SASARAN (5 Tahun)	INDIKATOR	TAHUN 2013	
			Target	Realisasi
I	Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,52.	Kualitas hidup manusia		
		- Indeks Harapan Hidup (Kesehatan)	73,22	67.87
		- Indeks Pendidikan	83,92	77.93
		- Indeks Daya beli	63,36	65.14
		- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,50	70.31
II	Tercapainya kenaikan indeks kesehatan penduduk 74,33 melalui angka harapan hidup (AHH) 69,60 tahun.	Kesehatan		
		Angka Harapan Hidup (AHH)	68,93	65.72
		Angka Kematian Bayi (AKB) (1.000)	49,46	4.87
		- Jumlah kematian bayi < 1 tahun	2.040	227
		- Jumlah kelahiran	41.247	46,657
		Prosentase balita gizi buruk (%) (menurut usia)	1,04	1,21
		- Balita gizi buruk	1.669	2.115
		- Jumlah balita	160.470	175,501
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk (10.000)	0,0424	0,004
		- Jumlah rumah sakit	10	9
		- Jumlah penduduk (jiwa)	2.360.034	2.286.967
		Rasio puskesmas per satuan penduduk (1000)	0,029	0,025
		- Jumlah puskesmas	68	57
		- Jumlah penduduk (jiwa)	2.360.034	2.286.967
		Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk (1000)	0,031	0,030
		- Jumlah puskesmas pembantu	72	69
		- Jumlah penduduk (jiwa)	2.360.034	2.286.967
		Rasio dokter per satuan penduduk (1000)	0,229	0,196
		- Jumlah dokter	541	449
		- Jumlah penduduk (jiwa)	2.360.034	2.286.967
		Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (1000)	1,376	1,105
- Jumlah paramedis	3.248	2537		
- Jumlah penduduk (jiwa)	2.360.034	2.286.967		
III	Tercapainya kenaikan indeks pendidikan penduduk 85,50 dengan rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) 98,25%.	Pendidikan		
		Angka Melek Huruf (AMH)	97	93.52
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,66	7.01
		APK SD (%)	104,36	109.23
		- Jumlah penduduk bersekolah SD	319.797	241,548
		- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	306.436	219,886
		APM SD (%)	99,27	99.99

No	SASARAN (5 Tahun)	INDIKATOR	TAHUN 2013	
			Target	Realisasi
		- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun bersekolah SD	304.199	219,855
		- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	306.436	219,886
		APK SMP (%)	102,36	110.62
		- Jumlah penduduk bersekolah SMP	161.836	105,449
		- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	158.105	96,326
		APM SMP (%)	95,24	85.33
		- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun bersekolah SMP	150.579	85.125
		- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	158.105	96,326
		Rasio guru per murid (1000)		
		Tingkat SD	33.109	32.36
		- Jumlah guru	10.072	9,795
		- Jumlah murid	306.436	302,642
		Tingkat SMP	45.086	43.99
		- Jumlah guru	6.789	6,648
		- Jumlah murid	150.579	151,109
		Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (10.000)		
		Tingkat SD	37.460	41.66
		- Jumlah sekolah	1.148	916
		- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	306.436	219,886
		Tingkat SMP	13.662	25,02
		- Jumlah sekolah	216	241
		- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	158.105	96,326
	Tercapainya Wajib belajar 12 tahun maka dilakukan kebijakan DSP gratis sampai tingkat SLTA/SMK Negeri dan subsidi pendidikan bagi siswa sekolah swasta serta beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin (kurang mampu) & yang berprestasi.	APK SMA (%)	102,04	78,58
		- Jumlah penduduk bersekolah SMA	137.995	72.240
		- Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	135.236	91.930
		APM SMA (%)	90,75	59,88
		- Jumlah penduduk usia 16-18 tahun bersekolah SMA	122.727	55.049
		- Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	135.236	91.930
		Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (10.000)		
		Tingkat SMA	11.591	18.60
		- Jumlah sekolah	157	171
		- Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	135.236	91.930
		Rasio guru per murid (1.000)		
		- Tingkat SMA	49.497	56.41
		- Jumlah guru	6.075	3.996
		- Jumlah murid	122.727	70.834
IV	Tercapainya Indeks Daya Beli 63,73 melalui peningkatan daya	Ekonomi		
		Daya beli (Rp)	634.180	639,330

No	SASARAN (5 Tahun)	INDIKATOR	TAHUN 2013	
			Target	Realisasi
	beli sebesar Rp. 635.780,-	- Indeks Daya beli	63,36	64,55
		Rasio rumah layak huni (%)	62,80	61,3
		- Jumlah rumah layak huni	359.842	
		- Jumlah rumah	573.017	
	Tercapainya penurunan pengangguran rata-rata 20% per tahun dari pengangguran terbuka pada tahun yang bersangkutan.	Tingkat kesempatan kerja (%)	98.70	90,47
	Tercapainya pendapatan per kapita sebesar Rp 13.150.005,-	Pendapatan per kapita (Rp)	11789118	9,296,775

Ket:

**** Angka Proyeksi Bappeda.

B. Misi Ketiga

Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan :Peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban.

Tabel 2.26
PENCAPAIAN INDIKATOR MISI 3
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012

NO	Sasaran (5 tahun)	Indikator Sasaran	TAHUN 2013	
			Target	Realisasi
I	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,5	Skala Kepuasan Masyarakat	3,3	3,00

D. Misi Keempat

Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.

Tujuan :Peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi lokal.

Tabel 2.27

PENCAPAIAN INDIKATOR MISI 4KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013

NO	SASARAN (5 tahun)	INDIKATOR	TAHUN 2013	
			TARGET	REALISASI
I	Tercapainya peningkatan produksi sektor primer rata-rata 5%pertahun	Peningkatan perekonomian masyarakat		
		PDRB adh berlaku (Rp. Juta)	24,435,716	27.277.681,11
		PDRB adh konstan (Rp. Juta)	9,000,595	9.414.607,01
		Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) (%)	5.14	5.07
		Tingkat inflasi (%)	7.50	3.03
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1.41	1.37
		Penyerapan investasi (Rp juta)	380,000	744.765
		Pertumbuhan produksi sektoral (9 sektor)		
		- Pertanian	3.10	3.86
		- Pertambangan dan penggalian	6.03	5.21
		- Industri (pengolahan)	3.05	5.40
		- Listrik, gas dan air bersih	6.97	6.10
		- Bangunan/konstruksi	7.70	3.89
		- Perdagangan, hotel dan restoran	6.20	5.46
		- Pengangkutan dan komunikasi	6.16	5.36
		- Keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan	5.06	4.06
		-Jasa-jasa lain	7.08	7.30
		Peningkatan infrastruktur		
		Prosentase penduduk berakses air minum (%)	16.13	
		- Penduduk berakses air leding (RT)	91,865	NA
		- Jumlah penduduk (RT)	569,530	597,751
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)		
		Jalan Kabupaten (%)	81.00	77.00
		- Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	521.79	497.92
		- Total panjang jalan (km)	644.18	646.65
		Jalan desa dan poros desa (%)	37.00	66.67
		- Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	174.77	312.06
		- Total panjang jalan (km)	742.36	468.07
		Rasio jaringan irigasi	51.11	13,39
		- Panjang saluran irigasi (m)	2,754,937	115,51
		- Luas lahan budidaya pertanian (Ha)	53,905	53,905
		Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (1000)	134.58	21,68
		- Jumlah daya tampung TPS (M3)	313,200	105,487
		- Jumlah penduduk (jiwa)	2,327,160	2,286,967
		Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	98.86	NA
		- Jumlah rumah tangga pengguna listrik	563,037	NA

NO	SASARAN (5 tahun)	INDIKATOR	TAHUN 2013	
			TARGET	REALISASI
		- Jumlah rumah tangga	569,530	597,751

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan

Bertolak dari kemajuan pembangunan yang telah dicapai tahun 2013 dan melihat rencana capaian kinerja pembangunan tahun 2014, Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dibawah ini :

BIDANG PENDIDIKAN

- Tingginya angka putus sekolah terutama pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah
- Rendahnya AMH di Kab. Cirebon
- Rendahnya APK/APM tingkat SLTP-SLTA
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya akses masyarakat
- Tata kelola pendidikan yang belum baik

BIDANG KESEHATAN

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan
- Tingginya kasus gizi buruk
- Tingginya Kematian ibu, bayi dan balita
- PHBS dan kualitas kesehatan lingkungan masih rendah berdampak pada terjadinya penyakit menular

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah
- SKPD penyedia layanan umum belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat
- Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang membidangi SPM.
- Tingginya angka kriminalitas dan kerawanan social

KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KETENAGA KERJAAN

- Belum optimalnya koordinasi pengelolaan program pengentasan kemiskinan
- basis data keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai dasar intervensi pengentasan kemiskinan
- Jumlah pengangguran terbuka masih relatif tinggi sementara lapangan kerja dan peluang kerja sangat terbatas
- Sistem informasi ketenagakerjaan dan peluang kerja masih belum terintegrasi dengan baik
- Nilai kompetisi, produktivitas dan Kompetensi SDM tenaga kerja masih rendah
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk pembinaan pendidikan dan keterampilan

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

- Stabilitas Harga bahan pangan pokok belum terkendali dengan baik terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari raya keagamaan.
- Fluktuasi produksi bahan pangan akibat perubahan iklim global dan konversi lahan pertanian produktif
- Masih terjadinya kerawanan pangan , kasus kurang gizi dan gizi buruk
- Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.
- Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
- Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena kemiskinan.
- Kurang mantapnya fungsi lembaga penyuluh, kompetensi penyuluh dan belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh.

INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

- Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
- Adanya kendala status lahan bagi pengembangan infrastruktur jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya.
- Aksesibilitas antar wilayah dalam kabupaten belum merata
- Belum adanya perencanaan detail tata ruang

LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

- Kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan laut; lahan; aliran sungai; dan udara akibat dampak usaha/kegiatan dan perubahan iklim global
- Pelayanan dan pengelolaan limbah cair dan padat belum optimal
- Mitigasi bencana dan kegawatdaruratan belum dilakukan dengan baik
- Belum tersedianya gudang logistik untuk buffer stock bantuan bencana

2.3.2 Isu Strategis Tahun 2014

Isu strategis merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2014 serta permasalahan utama Kabupaten Cirebon di Tahun 2014 serta permasalahan utama Kabupaten Cirebon yang merupakan prioritas penanganan. Isu Strategis disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014, Musrenbang Kabupaten Cirebon Tahun 2013, RKP Nasional, RKPD Provinsi serta pertimbangan para pemangku kepentingan. Untuk Tahun 2014 ditetapkan isu strategis Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. kemiskinan, pengangguran dan ketenaga kerjaan
2. akses pelayanan pendidikan
3. pelayanan kesehatan

4. tata kelola pemerintahan
5. ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM
6. ketahanan pangan masyarakat
7. infrastruktur jalan, jembatan, sumberdaya air; penataan fungsi ruang; serta penataan perumahan dan pemukiman
8. kerusakan, pencemaran, konservasi lingkungan hidup, dan mitigasi bencana alam

BAB III

RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan Tahun ke-5 atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014. Pada Tahun 2014 tema perencanaan Kabupaten Cirebon adalah “pembangunan Kabupaten Cirebon yang aspiratif menuju masyarakat yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera”. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon tahun 2014 mengupayakan pola pembangunan aspiratif bagi keterwujudan masyarakat yang beriman, sehat, dan cerdas dan sejahtera seiring dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sementara, tema perencanaan Jawa Barat Tahun 2014 yaitu “Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera” dan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat pada tahap “memantapkan pembangunan secara menyeluruh”,

Berdasarkan hasil evaluasi RJPMD Kabupaten Cirebon Tahun 2013, pencapaian realisasi angka-angka target RPJMD masih memerlukan akselerasi sehingga dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Pada aspek ekonomi, indikator makro pembangunan ekonomi tahun 2013 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% dengan nilai PDRB (harga konstan) mencapai Rp. 9.403.632,70 (dalam juta). Tingkat inflasi sebesar 3,03%. Pada tahun 2013, realisasi investasi cukup menggembirakan dengan capaian senilai Rp. 745,548,296,300. Nilainya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 687.500.000.000. Namun demikian, Kabupaten Cirebon masih menghadapi jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak yaitu sebesar 14,94%.

Untuk mensinergikan pembangunan Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon merujuk pada prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam sepuluh common goals dan non-common goals sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama antara gubernur dengan bupati/walikota nomor 912/05/Bapp tentang prioritas pembangunan ekonomi WKPP di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon memiliki basis tematik pembangunan kewilayahan WKPP III Cirebon dengan prioritas pembangunan yaitu:

1. Pengembangan agribisnis mangga.
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija.
3. Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya.
4. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai.
5. Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan.

Untuk mendorong pertumbuhan (ProGrowth), memperluas kesempatan kerja (Pro Job), menanggulangi kemiskinan (Pro Poor), dan merespon persoalan-persoalan lingkungan (Pro Environment), arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2014 adalah mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkualitas, dan merata melalui pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat. Kebijakan yang terkait dengan pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat adalah :

1. Peningkatan pemerataan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan daya saing industri dan meningkatkan sistem & jaringan distribusi barang sertapengembangan pasar dalam dan luar negeri
3. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.
5. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan, pengembangan hutan rakyat, dan hutan kota.
6. Memperkuat kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM.
7. Memantapkan kondisi infrastruktur dan transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, distribusi barang dan jasa
8. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
9. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan fasilitas dasar permukiman

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menjadi gambaran kinerja pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi dan berusaha agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon mencapai 5,07 persen. Nilai sektor primer (pertanian), sektor sekunder (industri pengolahan), dan sektor tersier (perdagangan) berkontribusi besar bagi pencapaian investasi. Adapun komponen PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar Harga Konstan tahun 2011-2012 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
PDRB KABUPATEN CIREBON
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2012– 2013
(Dalam Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2013 ** (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)
A.	PRIMER			
1.	Pertanian	2.521.786,98	2.618.807,82	97.020,84
2.	Pertambangan dan penggalan	35.089,66	36,917.84	1.828,18

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN 2012 (Rp)	TAHUN 2013 ** (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)
B.	SEKUNDER			
3.	Industri Pengolahan	1.248.901,60	1,316,342.28	67.440,68
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	198.951,27	211,084.27	12.133,00
5.	Bangunan / Konstruksi	686.552,83	713,259.73	26.706,90
C.	TERSIER			
6.	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	2.090.345,59	2,204,416.38	114.070,79
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	547.761,98	577,135.77	29.373,79
8.	Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan	407.799,89	424,374.41	16.574,52
9.	Jasa-Jasa	1.212.739,34	1,301,294.20	88.554,86
	PDRB BRUTO:	8.949.929,14	9.403.632,70	453.703,56

Sumber : BPS Kab. Cirebon 2013

**= Angka sementara BPS 2013

3.1.2 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan

Pencapaian target indikator makro pembangunan merupakan target tahun 2014 yang ditetapkan sebagai indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014.

Tabel 3.2.

Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2012 dan 2013

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi	
		Tahun 2012	Tahun 2013****
1	2	3	4
1.	PDRB ADHB (Rp Juta)	21.149.353	27.277.681,11
2.	PDRB ADHK (Rp Juta)	8.949.929,14	9.403.632,70
3.	LPE (%)	4,81	5,07
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,03	3,03
5.	Penyerapan Investasi (Rp Juta)	1.020.717	744.765
6.	Pendapatan Perkapita Harga Konstan (Rp)	9.341.678	11.927.448
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,40	90,37
8.	IPM	70,18	70,31
9.	LPP (%)	1,37	1,02
10.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.263.978	2,286,967
11.	Pertumbuhan Produksi Sektoral (9 Sektor)	1. Pertanian (2,67) 2. Bangunan (7,96) 3. Jasa-jasa (8,92) 4. Keuangan, persewaaan & jasa perusahaan (7,19) 5. Pengangkutan & Komunikasi (7,21) 6. Perdagangan, hotel & restoran (5,34) 7. Pertambangan	1. Pertanian (3,85) 2. Bangunan (3,89) 3. Jasa-jasa (7,30) 4. Keuangan, persewaaan & jasa perusahaan (4,06) 5. Pengangkutan & Komunikasi (5,36) 6. Perdagangan, hotel & restoran (5,46) 7. Pertambangan

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi	
		Tahun 2012	Tahun 2013****
1	2	3	4
		(0,14)	(5,21)
		8. Industri (3,36)	8. Industri (5,40)
		9. Listrik (6,97)	9. Listrik (6,10)

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon.

Keterangan:

**** Angka Analisa Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kondisi Keuangan Daerah

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dan Proyeksi Perubahan 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon pada tahun 2013 sebesar Rp 2,262,804,717,602.00 dan pada tahun 2014 Perubahan APBD Kabupaten Cirebon diproyeksikan menjadi Rp 2,446,658,177,720.26

Tabel 3.3
APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2014
Target perubahan tahun 2014 dan tahun 2015

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Target Perubahan 2014 (Rp)	Proyeksi/target 2015 (Rp)
1	2	3	4	5	
4	Pendapatan Daerah	2,262,804,717,602.00	2.571.729.199.000,00	2.834,087,025,437	3,309,421,002,304.32
4.1	Pendapatan Asli Daerah	240,007,773,165.00	368.111.750.218,23	434,951,390,082	460,098,676,870.29
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	64,024,735,478.00	113.500.000.000,00	136,853,210,761.71	166,063,273,088.09
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48,979,293,834.00	104.464.269.284,00	104,499,489,228.00	119,414,714,135.52
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,539,748,000.00	7.848.808.000,00	8,618,663,588.00	9,925,579,509.71
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119,463,995,853.00	142.298.672.934,00	184,980,026,504.00	164,695,110,136.97
4.2	Dana Perimbangan	1,479,130,203,320.00	1.586.839.812.776,00	1.586.839.812.776,00	1,802,885,607,998.96
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	101,087,545,320.00	78.449.929.776,00	78.449.929.776,00	92,324,147,774.53
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1,280,797,128,000.00	1.406.862.523.000,00	1.406.862.523.000,00	1.602,096,280,224.44
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	97,245,530,000.00	101.527.360.000,00	101.527.360.000,00	108,465,180,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	543,666,741,117.00	616.777.636.005,77	812,295,822,579.71	1,117,308,509,979.10
4.3.1.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah		898.000.000,00	898.000.000,00	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	103,638,556,011.00	183.734.559.517,77	224,042,746,091.71	220,503,935,984.26

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Target Perubahan 2014 (Rp)	Proyeksi/target 2015 (Rp)
1	2	3	4	5	
	lainnya 2)				
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	303,881,185,106.00	432.145.076.488,00	432.145.076.488,00	644,145,076,488.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	136,147,000,000.00	-	155,210,000,000.00	181,787,704,962.81
	Jumlah Pendapatan	2,262,804,717,602.00	2.571.729.199.000,00	2.834,087,025,437	3,309,421,002,304.32
5	Belanja Daerah	2,289,934,717,602.00	2.618.599.602.401,00		3,309,421,002,304.32
5.1	Belanja Tidak Langsung	1,383,463,904,724.00	1.645.839.691.924,00	1,692,355,438,934.74	1,892,659,337,396.88
5.1.1	Belanja Pegawai	1,222,612,494,930.00	1.441.706.737.850,00	1,481,080,475,685.74	1,443,134,628,896.88
5.1.4	Belanja Hibah	74,025,551,294.00	34.232.000.000,00	46,417,000,000.00	55,228,750,000.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,410,000,000.00	16.020.400.000,00	16.020.400.000,00	16,530,100,000.00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	188,307,500.00	188.307.500,00	188.307.500,00	188,307,500.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	67,727,551,000.00	79.940.051.000,00	79.940.051.000,00	364,827,551,000.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	73.752.195.574,00	68,709,204,749.00	12,750,000,000.00
5.2	Belanja Langsung	906,470,812,878.00	972.759.910.477,00		1,416,761,664,907.44
5.2.1	Belanja Pegawai	129,749,151,040.00	119.852.426.970,00		155,843,783,139.82
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	445,256,591,291.00	547.488.480.381,00		552,537,049,313.90
5.2.3	Belanja Modal	331,465,070,547.00	305.419.003.126,00		708,380,832,453.72
	Jumlah Belanja	2,289,934,717,602.00	2.618.599.602.401,00		3,309,421,002,304.32
	Surplus/(Defisit)	(27,130,000,000.00)	(46.870.403.401,00)		0
6	Pembiayaan Daerah	27,130,000,000.00	46.870.403.401,00		

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Target Perubahan 2014 (Rp)	Proyeksi/target 2015 (Rp)
1	2	3	4	5	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	29,130,000,000.00	60.000.000.000,00		5.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	19,130,000,000.00	60.000.000.000,00		5.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan dana cadangan	10,000,000,000.00	-		-
	Jumlah penerimaan pembiayaan	29,130,000,000.00	60.000.000.000,00		5.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,000,000,000.00	13.129.596.599,00		5.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00			-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	12.307.614.000,00		5.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran pokok utang		821.982.599,00		-
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	2,000,000,000.00	13.129.596.599,00		-
	Pembiayaan netto		46.870.403.401,00		-
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	27,130,000,000.00	-		-

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon, Proyeksi 2014 Bappeda.

B. Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kabupaten Cirebon

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan asli kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan asli daerah ini diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Kondisi penerimaan PAD Kabupaten Cirebon pada kurun 2008-2013 tampak mengalami trend peningkatan. Namun, jika dilihat dari proporsi dengan nilai Pendapatan Daerah, jumlah PAD masih berkisar pada angka 10%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon selama periode 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2008-2013

NO	TAHUN	PAD	r (%)	APBD	PROPORSI THD APBD (%)
1	2008	119.064.200.652,00		1.192.197.618.661,00	9,99
2	2009	114.324.933.879,00	-3,98	1.280.676.315.684,00	8,93
3	2010	152.198.931.767,51	33,13	1.596.201.620.365,00	9,54
4	2011	204.777.770.274,00	34,55	1.892.903.810.341,00	10,82
5	2012	230.937.160.498,00	12,77	2.063.518.161.777,00	11,19
6	2013	257,537,874,736.00	10,32	2,416,333,883,226.00	10,65

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kabupaten Cirebon. Keberadaan dana perimbangan menjadi tumpuan pembangunan Kabupaten Cirebon. Memperhatikan alokasi selama lima tahun terakhir, pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Cirebon berada pada proporsi diatas 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Cirebon terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi cukup besar dalam membiayai pembangunan Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.5
PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008-2013

NO	TAHUN	DANA PERIMBANGAN	r (%)	APBD	PROPORSI APBD (%)
1	2008	870.338.861.095,00		1.192.197.618.661,00	73,00
2	2009	949.788.067.750,00	9,13	1.280.676.315.684,00	74,16
3	2010	1.045.344.823.182,00	10,06	1.596.201.620.365,00	65,49
4	2011	1.091.535.989.480,00	4,42	1.892.903.810.341,00	57,66
5	2012	1.325.738.099.958,00	21,46	2.063.518.161.777,00	64,25
6	2013	1.479.130.203.320,00	11,57	2,416,333,883,226.00	61,21

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari Provinsi Jawa Barat dan penerimaan dari Pusat. Untuk lebih jelasnya perkembangan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 3.6
PERKEMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008-2013

NO	TAHUN	DANA LAIN-LAIN YANG SAH	r (%)	APBD	PROPORSI APBD (%)
1	2008	140.470.776.980,00		1.192.197.618.661,00	11,78
2	2009	160.359.184.900,00	14,16	1.280.676.315.684,00	12,52
3	2010	299.176.686.550,00	86,57	1.596.201.620.365,00	18,74

4	2011	506.326.520.702,94	69,24	1.892.903.810.341,00	26,75
5	2012	393.842.675.544,00	-22,22	2.063.518.161.777,00	19,09
6	2013	605,652,086,244.00	53,78	2,416,333,883,226.00	25,06

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon

4. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Untuk belanja daerah, perkembangan belanja daerah tahun 2010-2011 mengalami kenaikan dari Rp. 1.883.903.281.817,00 (tahun 2011) menjadi Rp. 2.053.403.281.817,00 (tahun 2012) atau mengalami kenaikan 18,36% pada tahun 2010-2011 dan kenaikan 9,0% pada tahun 2011-2012. Pada tahun 2013, belanja daerah menjadi Rp 2,412,241,747,741.00 atau naik **11,52%** dari tahun sebelumnya

Tabel 3.7
PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2008-2013

NO	TAHUN	BELANJA	r (%)	ABPD	Proporsi APBD
1	2008	1.188.654.897.216,00		1.192.197.618.661,00	99,70
2	2009	1.260.725.055.265,00	6,06	1.280.676.315.684,00	98,44
3	2010	1.591.701.620.365,00	26,25	1.596.201.620.365,00	99,72
4	2011	1.883.903.810.341,00	18,36	1.892.903.810.341,00	99,52
5	2012	2.053.403.281.817,00	9,00	2.063.518.161.777,00	99,51
6	2013	2,412,241,747,741.00	17,47	2,416,333,883,226.00	99,83

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon

5. Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan pembiayaan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2008-2013

NO	TAHUN	PEMBIAYAAN	r (%)	APBD	Proporsi APBD
1	2008	62.323.779.934,00		1.192.197.618.661,00	5,23
2	2009	56.204.129.155,00	-9,82	1.280.676.315.684,00	4,39
3	2010	94.981.178.865,00	68,99	1.596.201.620.365,00	5,95
4	2011	81.263.529.884,00	-14,44	1.892.903.810.341,00	4,29
5	2012	102.885.345.817,00	26,61	2.063.518.161.777,00	4,99
6	2013	69,921,583,441.00	-32,04	2,416,333,883,226.00	2,89

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon

Selama tahun 2008-2013 Kabupaten Cirebon mengalami mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah pos sisa anggaran tahun sebelumnya.

6. Target dan Realisasi APBD Kabupaten Cirebon 2013

Total nilai APBD Perubahan Kabupaten Cirebon tahun 2013 sebesar Rp. 2,416,333,883,226.00 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 2,389,223,549,644.00. Adapun total belanja dalam APBD-P 2013 adalah Rp.2,412,241,747,741.00, dengan realisasi sebesar Rp. 2,324,459,360,602.00.

Adapun rincian pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013

N0	Uraian	Realisasi 2013
1	2	3
4	Pendapatan Daerah	2,314,277,795,105.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	249,115,023,157.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	81,617,720,438.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	53,648,557,597.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,532,149,268.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106,316,595,854.00
4.2	Dana Perimbangan	1,488,073,473,884.00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	110,030,815,884.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,280,797,128,000.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	97,245,530,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	577,089,298,064.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 2)	134,176,731,594.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	291,023,324,000.00
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	151,889,242,470.00
	Jumlah Pendapatan	2,314,277,795,105.00
5	Belanja Daerah	2,324,459,360,602.00
5.1	Belanja Tidak Langsung	1,427,369,753,089.00
5.1.1.	Belanja Pegawai	1,248,557,039,626.00
5.1.4.	Belanja Hibah	90,560,682,000.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	20,308,898,000.00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	29,256,281.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	67,553,577,182.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	360,300,000.00
5.2	Belanja Langsung	897,089,607,513.00
5.2.1.	Belanja Pegawai	118.638.969.489,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	371.043.933.962,00
5.2.3.	Belanja Modal	338.952.749.390,00
	Jumlah Belanja	2,324,459,360,602.00
	Surplus/(Defisit)	(10,181,565,497.00)
6	Pembiayaan Daerah	72,153,178,683.00
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	74,945,754,539.00

N0	Uraian	Realisasi 2013
1	2	3
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	64,013,718,926.00
6.1.2	Pencairan dana cadangan	10,932,035,613.00
	Jumlah penerimaan pembiayaan	74,945,754,539.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,792,575,856.00
	Pembentukan dana cadangan	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	792,575,856.00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	2,792,575,856.00
	Pembiayaan netto	72,153,178,683.00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	61,971,613,186.00

Sumber : Bag. Keuangan Setda, Kabupaten Cirebon

3.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Namun, upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Ada beberapa langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan cara melaksanakan :

- a. Pemutakhiran data dan penjaringan pajak daerah
- b. Pengamanan dan percepatan penerimaan (PBB, BPHTB)
 - 1) Spontanitas pembayaran PBB
 - 2) Evaluasi PBB
 - 3) Monitoring PBB
 - 4) Sosialisasi PBB dan BPHTB melalui Tatap Muka
 - 5) Percepatan Penerimaan PBB
 - a) Penggalian Potensi dan Penggalian Pendapatan
 - b) Pengamanan dan Percepatan Penerimaan Pajak Daerah dan Pembinaan Teknis Pembukuan UPT Pajak
 - c) Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB
 - d) Sosialisasi Pendapatan Daerah
 - e) Survey Potensi Pajak Daerah
 - f) Pengendalian UPT Pajak dan Wajib Pajak
 - g) Peningkatan Kemampuan Penggalian Potensi Pajak Daerah
 - h) Penyerahan SPT, SKP, dan Penagihan Pajak
 - i) Sosialisasi Cukai Tembakau

3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah merumuskan kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan pagu indikatif sektoral. Pada perubahan Anggaran tahun 2014 dialokasikan juga untuk belanja kegiatan yang secara spesifik bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cirebon mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7). Visi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Beriman, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”**. Sedangkan misi yang harus dilaksanakan meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah melalui peningkatan pendidikan agama.
- b. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin.
- c. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- d. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.

Hubungan misi, tujuan, dan sasaran daerah Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Cirebon

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah melalui peningkatan pendidikan agama.	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak dan berilmu;	Tercapainya rata-rata penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar 10% .

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin.	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,52. 2. Tercapainya kenaikan indeks pendidikan penduduk 85,5 dengan rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) 98,25%. 3. Tercapainya kenaikan indeks kesehatan penduduk 74,33 melalui angka harapan hidup (AHH) 69,60 tahun. 4. Tercapainya Indeks Daya Beli 63,73 melalui peningkatan daya beli sebesar Rp. 635.780,- 5. Tercapainya penurunan pengangguran rata-rata 20% per tahun. 6. Tercapainya pendapatan per kapita sebesar Rp 13.150.005,-.
Peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban	Peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,5
Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.	Peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi lokal	Tercapainya peningkatan produksi sektor primer rata-rata 5% pertahun

4.2 Prioritas Pembangunan

Dalam Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, aspek fisik dan prasarana wilayah.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014, berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun

2014, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 ditetapkan untuk menjawab isu strategis, sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenaga kerjaan
2. Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan
3. Perluasan dan peningkatan pelayanan kesehatan
4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan
5. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM
6. Penguatan ketahanan pangan masyarakat
7. Pembenahan infrastruktur jalan, jembatan, sumberdaya air; penataan fungsi ruang ; serta penataan perumahan dan pemukiman
8. Pengendalian kerusakan dan pencemaran, konservasi lingkungan hidup, dan mitigasi bencana alam
9. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden 2014

Selanjutnya setiap prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan prioritas sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksanaannya. Hubungan prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 dengan kebijakan prioritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.

Hubungan prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas Tahun 2014

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kebijakan prioritas Daerah
1	Penanganan Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi data KK miskin 2. Pengurangan beban KK miskin 3. Pemberdayaan KK miskin termasuk PMKS 4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Perluasan Kesempatan kerja 6. Peningkatan penempatan tenaga kerja 7. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan non-formal 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan Mutu/kualitas Tenaga pendidikan 4. Beasiswa bagi masyarakat miskin

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kebijakan Daerah
3	Perluasan dan peningkatan pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan cakupan asuransi jaminan kesehatan masyarakat 2. Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat ibu dan bayi 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 4. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan 5. Peningkatan Kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat 6. Perluasan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat
4	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan e-gov, menuju Cirebon Cyber Regency 2. Pelayanan perijinan 3. Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh. 4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. 6. Pelaksanaan Survey IKM 7. Tata kelola kelurahan dan pemerintah desa 8. Persiapan Pemilu Tahun 2014
5	Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses modal, bahan baku dan teknologi bagi IKM, UMKM dan Koperasi 2. Peningkatan iklim investasi 3. Settlement dan Penataan Pedagang Kaki Lima di lima Pusat Kegiatan Lokal dan 5 PKLp 4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kebijakan Daerah
6	Penguatan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan desa mandiri pangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana produksi 3. Peningkatan Produksi tanaman pangan, peternakan dan perikanan 4. Penganekaragaman konsumsi pangan 5. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 6. Penanganan gizi buruk 7. Pemantapan lembaga penyuluhan dan pemenuhan satu desa satu penyuluh
7	Pembenahan infrastruktur jalan, jembatan, sumberdaya air; penataan fungsi ruang ; serta penataan perumahan dan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayananpergerakan orang, barang, dan jasa 2. Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman 3. peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air 4. Peningkatan jangkauan dan pemerataan jaringan irigasi 5. Penyusunan rencana detail tata ruang 6. Pengendalian alih fungsi lahan dengan penetapan sawah berkelanjutan
8	Pengendalian kerusakan dan pencemaran, konservasi lingkungan hidup, dan mitigasi bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lingkungan (air, udara, pesisir, laut dan tanah); 2. Peningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, ndustri dan masyarakat; 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 5. Peningkatan upaya mitigasi bencana dan pengelolaan resiko bencana;
9	Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden	fasilitasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Cirebon akan mendorong percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Tahun 2014 pada SKPD yang terkait sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 akan dilaksanakan 15 (lima belas) SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil daerah dalam bidang bersangkutan, dengan rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

- a. Bidang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan.
- b. Bidang Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.
- d. Bidang Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Bidang Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
- h. Bidang Pendidikan Dasar, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar.
- i. Bidang Pekerjaan Umum, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- j. Bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.

- k. Bidang Ketahanan Pangan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/T.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- l. Bidang Komunikasi dan Informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi.
- m. Bidang Kesenian, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian.
- n. Bidang Penanaman modal, berdasarkan Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
- o. Bidang Perhubungan khusus angkutan masal berbasis jalan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012

BAB V

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2014

5.1 Rincian program dan kegiatan pokok RKPD Tahun 2014.

Program dan kegiatan disusun dalam perubahan RKPD ini merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2014. Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2014, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II dan bab III.

Tahun 2014 ini juga merupakan tahun transisi antara periode RPJMD 2009-2014 dengan pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Oleh karena itu dalam perubahan RKPD ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan juga diarahkan pada persiapan pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Selain itu juga dalam RKPD perubahan ini memuat rencana program yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang merujuk Peraturan Bupati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DBH-CHT. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2014 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada tabel sebagaimana terlampir

5.2 Instansi Pelaksana.

(Lihat pada Tabel Rencana Kerja (Renja) per-SKPD 2014)

5.3 Indikator Capaian Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dan prakiraan Maju

(Lihat pada Tabel Rencana Kerja (Renja) per-SKPD 2014)

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014.

Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2014 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian SKPD, apabila ditemukan adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Cirebon c.q Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Cirebon c.q Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2014, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2014.
8. Kepala Bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 5
	1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I - 5
	1.5 Maksud dan Tujuan	I - 6
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II - 1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 25
	2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 33
BAB III	PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III - 1
	3.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III - 1
	3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 4
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014	IV - 1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
	4.2 Prioritas Pembangunan	IV - 2
BAB V	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2014	V - 1
BAB VI	PENUTUP	VI - 1